

RINGKASAN

RELASI BPD-KEPALA DESA **Kajian Relasi Kekuasaan BPD-Kepala Desa Dan Transformasi Sosial**

Yaqub Cikusin

Disertasi ini mengkaji dan menganalisis fenomena relasi kekuasaan BPD-kepala desa dalam konteks transformasi sosial di desa terkait: 1) mengidentifikasi latar belakang lingkungan desa penelitian yang berpengaruh terhadap pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa; 2) mendeskripsikan profil institusi BPD-kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di desa; 3) mengidentifikasi beberapa sumber dan basis kekuasaan BPD; 4) mengungkap dan menyajikan pola relasi BPD-kepala desa melalui kasus nyata di desa penelitian yang muncul dalam proses transformasi di desa; 5) mendiskusikan konsep kekuasaan BPD-kepala desa atas dasar data atau temuan di lapangan dan menyusun teori relasi kekuasaan dari data.

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dalam mengkaji fenomena Transformasi Sosial yang dilakukan oleh BPD. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi (*participant observation*) dan wawancara mendalam untuk data primer (peneliti terjun langsung ke lapangan, melakukan hubungan pribadi akrab dengan pengurus BPD, kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat), dokumentasi untuk data sekunder (data statistik, Monografi, buku laporan, arsip surat). Data yang terkumpul di analisis model interaktif.

Dari kajian lapangan diperoleh temuan sebagai berikut. 1) Konteks sosial budaya masyarakat Noman digunakan sebagai pemicu semangat kerja pengurus BPD dalam melakukan perubahan. 2) Pola relasi BPD-kepala desa dalam penerapan transformasi sosial terdapat hubungan yang bersifat kerjasama, saling tukar informasi dan klarifikasi. Ketidak harmonisan terjadi ketika persepsi dan pemaknaan yang berbeda (kata sejajar-mitra) diantara mereka dari esensi perundang-undangan itu sendiri. 3) Relasi kekuasaan BPD-kepala desa dalam transformasi sosial dalam kasus. a) Peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Pengurus BPD telah memerankan mitra relasi kekuasaannya dengan kepala desa (kewenangan, pengaruh dan perannya) *barembuk* secara baik (dialogis) sesuai dengan konteks persoalan lokal. Relasi kekuasaan BPD-kepala desa cenderung bersifat konflik dan kompetisi. b) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Menunjukkan kedua belah pihak telah memainkan kekuasaannya, saling menyalaskan, mau saling memberi dan menerima, relasi kekuasaan BPD-kepala desa cenderung bersifat kerjasama dan kolaborasi. c) Pelaksanaan peraturan desa, menunjukkan pengurus BPD dapat memerankan mitra relasi kekuasaannya dengan kepala desa (kewenangan, pengaruh, dan perannya) *barembuk* secara baik (dialogis) sesuai dengan konteks persoalan lokal. Relasi kekuasaan BPD-Kepala desa cenderung bersifat kerjasama dan kolaborasi. d) pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa, menunjukkan kedua belah pihak memainkan kekuasaannya, saling menyalaskan dan mau saling memberi dan menerima. Relasi kekuasaan BPD-Kepala desa menunjuk kepada konflik dan kerjasama. e) Partisipasi masyarakat menunjukkan kepemimpinan BPD melakukan pendekatan dengan *barembuk* dialogis sesuai dengan kondisi setempat. Dengan melimpahkan kepada elit-elit strategis yang

memang menguasai bidangnya masing-masing (*polymorphic leader*). Relasi kekuasaan BPD-masyarakat cenderung bersifat kerjasama.

Secara konseptual, penelitian ini menemukan peran BPD dalam transformasi sosial bersifat responsif proaktif yang berakar pada konteks lokal dengan tidak meninggalkan unsur legalitas dan rasionalitas. Temuan ini merupakan perkembangan dari teori kekuasaan Tannenbaum dan Schmidt berorientasi pada relasi kekuasaan bergerak secara kontinum bebas kendali. Pola relasi kekuasaan BPD-Kepala desa dalam transformasi memiliki kelebihan, karena menggunakan pendekatan konteks lokal. Pendekatan konteks lokal ini ternyata belum dijamah baik oleh Tannenbaum. Sehingga muncul penghalusan teori Tannenbaum tentang kekuasaan kontinuum, *interface* dan konteks lokal (budaya lokal).

Implikasi praktis yang dihasilkan pendekatan konteks lokal desa Noman merupakan suatu strategi yang perlu dikembangkan oleh pengurus BPD dalam melaksanakan transformasi social, mengingat setiap budaya merupakan hasil dari suatu masyarakat dan sekaligus akan menjadi milik masyarakat tersebut. Oleh karena itu dengan mencantumkan atau memasukkan pendekatan konteks (budaya lokal) dalam transformasi diharapkan dapat memperlancar proses perubahan.



SUMMARY
RELATION OF VILLAGE HEADMAN -BPD
Study of The Authority Relation of Village Headman -BPD
In Social Transformation

Yaqub Cikusin

Along with this, examining and analyzing the phenomenon authority of village headman-BPD in social transformation context in the village: (1) to identify background of research village which influence dynamics of authority relation of village headman; (2) to describe institution profile of village headman as the authority holder in the village; (3) to identify some of resources and bases of BPD authority; (4) to express and examine dynamics relation of village headman-BPD through the real case in the research village that appears in transformation process in the village; (5) to discuss the concept of village headman-BPD based on data and finding on the field and to compile authority relation theory from data.

From the field examined was found that: (1) socio-cultural society of Norman is used as the stimulation to do the job for manager in doing the change. (2) Relation dynamic of village headman-BPD in applying social transformation, there was cooperation relationship, exchange information and clarification each other, inharmonic relation happened when found the different perception and interpretation among them from the contents of the regulation itself. (3) The authority relation implementation of village headman-BPD in the case of social transformation. (a) The function of BPD in compiling and determining village regulation. The functionalists of BPD have played a role of corporation in their authority relation with village headman (authority influence and their function) as well as local problem context. The authority relation of village headman-BPD disposed conflict and competition. (b) Compiling and determining of APBD showed among them have played a role in their authority, balance, take, and give each other, authority relation of village headman-BPD disposed corporation and collaboration. (c) Village regulation implementation showed that the functionalist of BPD could play a role in their authority relation with village headman

(authority influence and their function) as well as local problem context, authority relation of village headman-BPD disposed corporation and collaboration. (d) Responsibility implementation of village headman showed that both of them play a role in their authority, balance, take, and give each other. The authority relation village disposed on the conflict and corporation. (e) Society participation showed that the functionalists of BPD did dialogue approach as conditioned. By giving in abundance for elite strategy which mastering their object (polymorphic leader). Authority relation society-BPD disposed on the corporation.

Conceptually, this research found authority relation of BPD in social transformation dialogue responsively based on local cultural without leaving legality and rationality. This finding is the development of Tannenbaum and Schmidt authority theory, which is oriented on authority relation mobility freely but controlled. The authority relation dynamics of village headman-BPD on the transformation has benefit, because of using context approaching (local culture). This local culture is not touched yet even by Tannenbaum. So that's why, appears softened Tannenbaum about continuity authority, interface and local context.

Practice implication, which is resulted by local context approach Noman village is the strategy, which needs to be improved by functionalist of BPD to implement social transformation, because every culture is the result of society and it will belong to society. Hence, by including or take context approach (local culture) in transformation of BPD expected to be able to accelerate change process.

ABSTRAK

RELASI BPD-KEPALA DESA

Kajian Relasi Kekuasaan BPD-Kepala Desa Dan Transformasi Sosial

Yaqub Cikusin

Disertasi ini mengkaji dan menganalisis fenomena relasi kekuasaan BPD-kepala desa dalam konteks transformasi sosial di desa terkait: (1) mengidentifikasi latar belakang lingkungan desa penelitian yang berpengaruh terhadap pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa; (2) mendeskripsikan profil institusi BPD-kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di desa; (3) mengidentifikasi beberapa sumber dan basis kekuasaan BPD; (4) mengungkap dan menyajikan pola relasi BPD-kepala desa melalui kasus nyata di desa penelitian yang muncul dalam proses transformasi di desa; (5) mendiskususkan konsep kekuasaan BPD-kepala desa atas dasar data atau temuan di lapangan dan menyusun teori relasi kekuasaan dari data.

Dari kajian lapangan diperoleh temuan sebagai berikut. (1) Konteks sosial budaya masyarakat Noman digunakan sebagai pemicu semangat kerja pengurus BPD dalam melakukan perubahan. (2) Pola relasi BPD-kepala desa dalam penerapan transformasi sosial terdapat hubungan yang bersifat kerjasama, saling tukar informasi dan klarifikasi. Ketidak harmonisan terjadi ketika persepsi dan pemaknaan yang berbeda (kata sejajar-mitra) diantara mereka dari esensi perundang-undangan itu sendiri. (3). Relasi kekuasaan BPD-kepala desa dalam transformasi sosial dalam kasus. a) Peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Pengurus BPD telah memerankan mitra relasi kekuasaannya dengan kepala desa (kewenangan, pengaruh dan perannya) *barembuk* secara baik (dialogis) sesuai dengan konteks persoalan lokal. Relasi kekuasaan BPD-kepala desa cenderung bersifat konflik dan kompetisi. b) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Menunjukkan kedua belah pihak telah memainkan kekuasaannya, saling menyalaskan, mau saling memberi dan menerima, relasi kekuasaan BPD-kepala desa cenderung bersifat kerjasama dan kolaborasi. c) Pelaksanaan peraturan desa, menunjukkan pengurus BPD dapat memerankan mitra relasi kekuasaannya dengan kepala desa (kewenangan, pengaruh, dan perannya) *barembuk* secara baik (dialogis) sesuai dengan konteks persoalan lokal. Relasi kekuasaan BPD-Kepala desa cenderung bersifat kerjasama dan kolaborasi. d) pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa, menunjukkan kedua belah pihak memainkan kekuasaannya, saling menyalaskan dan mau saling memberi dan menerima. Relasi kekuasaan BPD-Kepala desa menunjuk kepada konflik dan kerjasama. e) Partisipasi masyarakat menunjukkan kepemimpinan BPD melakukan pendekatan dengan *barembuk* dialogis sesuai dengan kondisi setempat. Dengan melimpahkan kepada elit-elit strategis yang memang menguasai bidangnya masing-masing (*polymorphic leader*). Relasi kekuasaan BPD-masyarakat cenderung bersifat kerjasama.

Secara konseptual, penelitian ini menemukan peran BPD dalam transformasi sosial bersifat responsif proaktif yang berakar pada konteks lokal dengan tidak meninggalkan unsur legalitas dan rasionalitas. Temuan ini merupakan perkembangan dari teori kekuasaan Tannenbaum dan Schmidt berorientasi pada relasi kekuasaan bergerak secara kontinum bebas kendali. Pola relasi kekuasaan BPD-Kepala desa dalam transformasi memiliki kelebihan, karena menggunakan

pendekatan konteks lokal. Pendekatan konteks lokal ini ternyata belum dijamah baik oleh Tonnenbaum. Sehingga muncul penghalusan teori Tonnenbaum tentang kekuasaan kontinuum, *interface* dan konteks lokal (budaya lokal).

Implikasi praktis yang dihasilkan pendekatan konteks lokal desa Noman merupakan suatu strategi yang perlu dikembangkan oleh pengurus BPD dalam melaksanakan transformasi sosial. Mengingat setiap budaya merupakan hasil dari suatu masyarakat dan sekaligus akan menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu dengan mencantumkan atau memasukkan pendekatan konteks (budaya lokal) dalam transformasi diharapkan dapat memperlancar proses perubahan.

Key Words: BPD, Transformasi Sosial, Pedesaan

